

Berita	: Kelebihan Bayar Jadi Temuan BPK
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Kamis, 1 Febuari 2018

Kelebihan Bayar Jadi Temuan BPK

Selain di Pemprov Jabar, Ketidaktaatan juga Terjadi di Pemkot Bandung

BANDUNG, (PR)-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan empat kasus kelebihan pembayaran dalam pemeriksaan belanja tahun anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lembaga tinggi negara ini juga menyimpulkan pengelolaan aset oleh Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya efektif.

Keempat kasus kelebihan bayar dalam belanja Pemprov Jabar terjadi di paket pekerjaan jasa konsultasi di 11 OPD (organisasi perangkat daerah), pekerjaan pembangunan masjid Dinas Perumahan dan Permukiman, pekerjaan pembangunan Gedung Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah, serta pekerjaan pembangunan gedung kamar operasi RSUD Pameungpeuk Garut. Tak diungkap berapa total kelebihan bayar di empat kasus ini.

Temuan ketidaktaatan administrasi penganggaran juga ditemukan di belanja Pemkot Bandung. Ada tiga kasus yang disebut, yakni pembayaran biaya makan perjalanan dinas luar daerah di lima OPD, biaya penginapan oleh Sekretariat DPRD pada perjalanan dinas yang tak sesuai ketentuan, serta realisasi belanja BBM (bahan bakar minyak) oleh Sekretariat DPRD pada pihak yang tidak berhak.

Temuan dalam anggaran belanja Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung tahun anggaran 2017 merupakan hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang tuntas dikerjakan akhir tahun lalu. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa menyatakan, ada setidaknya dua rekomendasi yang diterbitkan. "Ada

rekomendasi perbaikan mekanisme kerja. Kalau terkait kerugian keuangan negara akibat pembayaran lebih, kami meminta dikembalikan ke kas daerah," tuturnya, Rabu (31/1/2018).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, pemprov siap menindaklanjuti temuan dan saran BPK dalam hasil pemeriksaan ini. Menurut dia, kasus kelebihan pembayaran, yang ia sebut nilainya tidak besar, disebabkan salah hitung semata. Ia melihatnya bukan sebagai sebuah kesengajaan. "Mengapa terjadi kelebihan pembayaran? BPK tidak menjelaskan. Tidak ada kesengajaan. Kami akan segera tagih, kembalikan (uang) ke kas daerah, selesai," tuturnya.

Ada yang menarik ketika Kepala BPK Jabar mempresentasikan hasil pemeriksaan di hadapan Heryawan. Ketika disebut adanya kelebihan pembayaran di pekerjaan pembangunan masjid, Heryawan berkomentar sambil menggeleng-gelengkan kepala.

"Pembangunan masjid dijadikan main-main," ujarnya.

Selain memeriksa belanja daerah, BPK Jabar juga memeriksa kinerja pengelolaan aset Pemkot Bandung sepanjang 2017. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan laporan-laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaan aset menjadi salah satu penyebab kegagalan pemkot meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Arman mengapresiasi keseriusan pemkot dalam inventarisasi aset. Sebuah kemajuan meski ada beberapa yang masih belum optimal seperti belum adanya aturan teknis turunan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. BPK juga menyebut pemantauan dan evaluasi oleh pengelola aset belum optimal.

Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengakui masih dibutuhkan perbaikan terus-menerus. **(Fri Joko Her Raidi)*****